



Bab IV

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2017 ini mengacu kepada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 disusun sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yakni Nawa Cita dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan menjadi landasan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP tahun 2017.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017

INDIKATOR MAKRO	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018 ¹⁾	Sasaran Akhir RPJMN 2019 ¹⁾
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	6,6 (5,3) ²⁾	7,1 (5,5 – 5,9)	7,5	8,0
Pengangguran (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	5,6-5,9 (5,94)	5,5-5,8 (6,18)	5,2-5,5 (5,4-5,7) ⁴⁾	5,0-5,3 (5,1 – 5,4)	4,6-5,1	4,0- 5,0
Angka Kemiskinan (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0- 10,0 (10,96)	9,5- 10,5 (11,13)	9,0-10,0 (10,0-10,6) ⁴⁾	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,0
Gini Ratio (indeks) (Realisasi & Penyesuaian Target)	n.a (0,41)	0,40 (0,41)	0,39	0,38	0,37	0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,1	76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS) ³⁾	0,55	n.a	n.a	n.a	n.a	meningkat

¹⁾ Dengan memperhatikan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali

²⁾ Target APBN 2016

³⁾ Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif

⁴⁾ Perkiraan realisasi 2016

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, selain itu ada beberapa kriteria yang ditentukan sebelum menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yaitu:

1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025
2. Merupakan prioritas pembangunan nasional tahun 2017.



3. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dan RPJMD 2016-2021.
4. Mengupayakan merupakan program-program yang dapat menyelesaikan masalah dan isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi di tahun 2017.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sejalan dengan Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan 4 (empat) Pengembangan Wilayah Kalimantan berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan yaitu: (1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; (2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi; (3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; dan (4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak



- ekonomi daerah pinggiran lainnya;
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75;
 3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan;
 4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
 5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
 7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah : (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan



- daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur); serta
8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki fungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya. Kebijakan dan sasaran pembangunan kewilayahan Kalimantan tersebut dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019).

Berdasarkan atas arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dan wilayah Kalimantan serta sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 maka tujuan dan sasaran daerah tahun 2017 adalah :



Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Misi 1 : Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah	Angka kemiskinan	5.70%	5.10%	4.60%	4.20%	3.80%
		Angka pengangguran	7.20%	6.60%	6,3%	6%	5.70%
Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Angka pertumbuhan ekonomi	6,00%	6,40%	6,90%	7,30%	7,70%
		Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	92,86%	93,60%	94,26%	94,85%
	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di kecamatan perbatasan (1055,66 km)	78%	83%	88%	94%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang dijangkau <i>Broadband</i>	92,8%	96,4%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,19	81,14	82	84,76	84,76
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah	12,76 tahun	12,88 tahun	13,00 tahun	13,12 tahun	13,24 tahun
		Angka rata-rata lama sekolah	9,10 tahun	9,35 tahun	9,60 tahun	9,85 tahun	10,10 tahun
	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	72,00 tahun	72,10 tahun	72,20 tahun	72,30 tahun	72,40 tahun
Misi 2 : Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai							
Menjaga kedaulatan negara	Terjaganya keutuhan NKRI	Cakupan PLB yang dapat dijangkau	65%	67,5%	70%	72,5%	75%
		Layanan pemerintahan sampai tingkat desa kawasan perbatasan	65%	67,5%	70%	72,5%	75%
	Terjaganya keamanan	Persentase gangguan keamanan	20%	19,8%	19,6%	19%	18,9%
Membangun daerah perbatasan yang aman	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram	Persentase gangguan keamanan di perbatasan	20%	19,8%	19,6%	19%	18,9%
Mewujudkan penegakan hukum	Terwujudnya penegakan hukum	Persentase pelanggaran perda/pergub	1%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa							
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian pengisian struktur organisasi dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK)	25%	30%	40%	50%	60%
		Desa memiliki status Mandiri dalam IDM	2%	3%	4%	5%	6%
	Terwujudnya pemerintahan akuntabel	Nilai SAKIP	D	C	C	CC	B
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase layanan utama yang menggunakan teknologi informasi	0%	0%	10%	30%	50%
Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	C	B	B
	Meningkatnya pelayanan perizinan	Persentase SKPD yang layanan utamanya menerapkan SOP sesuai <i>business process</i>	60%	65%	70%	75%	75%
	Meningkatnya pelayanan kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	65%	75%	80%	90%	98%



4.2. Prioritas Pembangunan

4.2.1. *Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017*

Dalam dokumen RJPMN 2015-2019 mempunyai beberapa sasaran pokok pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan yang memacu pembangunan nasional yang kuat, inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran pokok nasional antara lain sebagai berikut :

1. **Ekonomi**

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara nasional diarahkan untuk memberikan landasan utama sebagai persiapan keluar dari Middle Income Trap (MIT) dan memasuki era sebagai negara maju berpendapatan tinggi pada Tahun 2030. Dalam mencapai tujuan untuk keluar dari MIT, perekonomian Indonesia harus tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui penguatan sektor primer dan peningkatan industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah sesuai keunggulan wilayah, dan modernisasi sektor jasa didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai dan handal. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan penguatan peranan UKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif (decent jobs), dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (financial inclusion). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ketahanan pangan, energi dan air.

2. **Lingkungan**

Pencapaian pembangunan di berbagai bidang dilakukan dengan tetap mengamankan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan yang dicerminkan pada langkah penurunan emisi GRK sebesar 26 persen pada 2019 (dari Business as usual/BAU), dan membaiknya Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran ini menggambarkan bahwa pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan sekaligus melaksanakan komitmen Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional. Selain itu, kapasitas kelembagaan penanganan bencana pada tingkat nasional dan daerah terus ditingkatkan.



3. Politik

Sasaran pokok dalam konsolidasi demokrasi adalah meningkatnya kualitas demokrasi substansial, ditandai dengan meningkatnya indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019. Sementara itu, sasaran pokok politik luar negeri Indonesia adalah menguatnya kepemimpinan dan peran Indonesia dalam berbagai kerja sama dan forum internasional. Salah satu sasaran penting adalah meningkatnya partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah PBB.

4. Hukum

Sasaran pokok dalam pembangunan hukum adalah terwujudnya sistem peradilan pidana dan perdata yang efisien, efektif, dan akuntabel bagi pencari keadilan, serta didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, dan operasional yang memadai. Sasaran juga ditujukan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5. Pertahanan dan Keamanan

Sasaran pokok dalam pembangunan sektor pertahanan dan keamanan adalah meningkatnya kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional melalui pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, peningkatan kepercayaan terhadap Polri, peningkatan kemampuan intelijen, pengamanan wilayah laut dan perbatasan, serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

6. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, sasaran pokok penguatan tata kelola adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.



7. Kesejahteraan Rakyat

Sasaran pokok pembangunan kesejahteraan rakyat tercapainya penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah sebagai hasil pembangunan yang inklusif. Meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat atau penurunan kemiskinan, tetapi tetapi juga harus terlihat dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta terciptanya system perlindungan sosial masyarakat yang baik. Masyarakat Indonesia sejahtera yang dibangun juga harus mempunyai karakter dan jati diri bangsa yang kuat serta menjaga dan mengembangkan kebudayaannya.

8. Kewilayahan

Sasaran pokok dalam pemerataan pembangunan antar wilayah adalah menurunnya tingkat kesenjangan antar-wilayah yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kabupaten tertinggal, meningkatnya peran wilayah Luar Jawa dalam pembentukan PDRB serta lebih meningkat dan merata pelayanan dasar di berbagai wilayah Indonesia.

9. Kelautan

Sasaran pokok pembangunan kelautan adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional, termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2015-2019, dilaksanakan dalam rangka **“Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah”** Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial secara luas dan sasaran wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan. Guna mewujudkan sasaran pembangunan nasional, dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah tersebut, maka dalam RPJMN Tahun 2015-



2019 ditetapkan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 5,7 %;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,2%.

4.2.2. *Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017*

Proses pembangunan Provinsi Kalimantan Utara jangka menengah Tahun 2016-2021, telah memasuki tahun kedua (Tahun 2017), yang dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Utara disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Utara tahun 2017, telah mengantisipasi dan mengakomodir perubahan kebijakan tersebut. DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara ikut berperan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, diantaranya melalui pokok-pokok pikiran DPRD.



Tabel 4.3
Program Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM baru	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang sehat	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang dibina	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bidang Perikanan	Persentase rumah tangga nelayan miskin yang terentaskan	Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan sasaran wilayah transmigrasi	Transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal	Cakupan transmigrasi lokal yang dibina	Transmigrasi
Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus	Persentase KK nelayan yang mengikuti transmigrasi Pola Khusus	Transmigrasi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang sehat	Perindustrian
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase sentra industri yang terjangkau	Perindustrian
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (<i>Social Forestry</i>)	Persentase partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan	Kehutanan
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Persentase POKDARWIS desa sekitar kawasan konservasi	Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	Kehutanan
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan PUG yang dibina	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase panti asuhan/panti jompo yang layak	Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pembinaan	Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani	Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina	Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina	Sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina	Sosial
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan regulasi ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan pelayanan ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan regulasi investasi	Penanaman Modal
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berkualitas Cakupan Badan Latihan Kerja yang	Tenaga Kerja



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
	tersedia	
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Cakupan pemuda yang berwirausaha	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terbangun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan kawasan konservasi yang tertangani	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya jumlah produksi	Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi	Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase ketersediaan pangan utama	Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tingkat kesakitan ternak	Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Ternak	Pertanian
	Produksi hasil ternak	
Program Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggul Daerah	Promosi atas hasil produksi peternakan unggul daerah	Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan penyuluh pertanian	Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase pemasaran	Pertanian
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Total ekspor produk perikanan	Kelautan dan Perikanan
	Konsumsi ikan per kapita	
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok yang telah mengikuti penyuluhan	Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
	Produksi perikanan budidaya rumput laut	
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Produksi perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan	Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase kelompok masyarakat pesisir yang mengikuti pemberdayaan	Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya peraturan perundangan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Konservasi	Terbentuknya kawasan ekowisata kelautan	Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah POKWASMAS	Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah masyarakat pesisir yang telah dilatih	Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dibina	Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah POKDARWIS yang terbentuk	Pariwisata
	Jumlah wisatawan	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase ODTW kawasan perbatasan yang dikembangkan	Pariwisata
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase kegiatan pertambangan yang terbina dan terawasi	Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Jasa Penunjang Usaha Pertambangan	Jumlah sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Peningkatan Kualitas SDM Pertambangan	Persentase SDM pertambangan yang berkualitas	Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengawasan dan Penertiban	Persentase kegiatan rakyat yang	Energi dan Sumber



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	terawasi dan berpotensi merusak lingkungan	Daya Mineral
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase jumlah industri berorientasi ekspor	Perindustrian
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan (PDRB sektor industri pengolahan)	Perindustrian
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan nilai ekspor	Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah usaha dan sarana perdagangan	Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peredaran komoditas perdagangan yang terawasi	Perdagangan
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang di daerah yang sesuai dengan ketentuan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase perencanaan RTH yang terealisasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Lingkungan Hidup
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang perhubungan	Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor dan angkutan umum yang layak	Perhubungan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Persentase data/informasi kondisi jalan dan jembatan yang tersedia	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	Persentase pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan yang menggunakan aplikasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya fasilitas perhubungan	Perhubungan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase realisasi pendukung Kota Baru Mandiri Tanjung Selor (pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat kegiatan masyarakat, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Struktur Industri	Persentase Tersedianya pendukung kawasan industri	Perindustrian
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase air baku yang terbangun dan dikelola	Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun dan dikelola	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase air limbah yang dikelola	
Program Pengembangan Perumahan	Penurunan jumlah Backlog Kaltara	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penyediaan air bersih, penurunan kawasan kumuh dan penyediaan sarana sanitasi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal makam yang tertata	Perumahan Rakyat dan Kawasan



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
		Permukiman
Program Pengendalian Banjir	Persentase daerah rawan banjir yang tertangani	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase panjang pantai rawan abrasi yang tertangani	
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase saluran drainase yang berfungsi normal	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga terbarukan untuk fasilitas komunal di kawasan perbatasan	Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (mobilitas)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan kondisi layak [misal : rambu, marka, sinyal, dll]	Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	Fatalitas kecelakaan lalu lintas	Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Indeks kepuasan masyarakat bidang perhubungan	Perhubungan
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase media massa lokal dan nasional yang dilibatkan dalam penyebaran informasi	Komunikasi dan Informatika
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan pelayanan jasa titipan	Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan infrastruktur komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan Informatika
	Persentase kerjasama dengan surat kabar nasional/lokal	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data informasi lingkungan hidup yang ter-update	Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase kawasan yang memiliki standar Status Lingkungan Hidup Daerah	Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi	Lingkungan Hidup
Program Inventarisasi Emisi dan Gas Rumah Kaca	Persentase kawasan yang sudah terinventarisasi ukuran Emisi dan Gas Rumah Kaca-nya	Lingkungan Hidup
Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Persentase kawasan yang terlindungi atmosfir dan perubahan iklim-nya	Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Udara	Lingkungan Hidup
	Indeks Pencemaran Air	
	Indeks Tutupan Hutan	
Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki standar kinerja pengelolaan lingkungan	Lingkungan Hidup
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	Kehutanan
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah izin usaha industri hasil hutan	Kehutanan
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat	Persentase kawasan hutan adat yang berstatus legal	Kehutanan
Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan	Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya	Kehutanan
Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan	Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	Kehutanan
Program Pendidikan Menengah	Angka pendidikan yang ditamatkan	Pendidikan
	Angka putus sekolah	
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA	
	Angka partisipasi murni	



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
	SMA/SMK/MA	
	Angka partisipasi sekolah MA/SMK/MA	
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	
	Angka melek aksara	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan sistem PSB bebas gratifikasi	Pendidikan
Program Pendidikan Luar Biasa	Angka partisipasi pendidikan luar biasa	Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan	Perpustakaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase jumlah kelompok/lembaga pelestari seni, budaya, sejarah dan tradisi yang difasilitasi	Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya daerah yang difasilitasi	Kebudayaan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase kegiatan pengembangan kepemudaan yang difasilitasi	Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan/ generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase kelompok pemuda dan olahraga yang dibina	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase kegiatan olahraga yang difasilitasi	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase kegiatan pembinaan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi	Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	Kepemudaan dan Olahraga
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase keluarga sadar gizi	Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase penurunan balita gizi kurang dan gizi buruk	Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki dokter umum sesuai standar	Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Puskesmas keliling aktif di setiap desa	Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat pelayanan kesehatan di rumah sakit	Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat-obatan di seluruh puskesmas, pustu, dan rumah sakit	Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase terlaksananya vaksinasi pada kelompok sasaran	Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kesehatan
Program Regulasi Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang memanfaatkan teknologi informasi	Kesehatan



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB Lestari	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase penduduk yang mengikuti bimbingan kesehatan reproduksi pra nikah	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Rasio pusat informasi dan konseling KRR per kabupaten	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase kelompok bina keluarga yang aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Partisipasi aktif institusi masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase kelompok pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang menerima bahan informasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola	Penunjang Pemerintahan
Program Penguatan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan	Persentase desa sadar kedaulatan NKRI	Penunjang Pemerintahan
Program Pembantuan Pengawasan Lintas Batas	Persentase pelanggaran batas wilayah yang dapat dikendalikan	Penunjang Pemerintahan
Program Pembantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perbatasan	Persentase kelembagaan ekonomi yang berkembang	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat perbatasan berwawasan kebangsaan	Penunjang Pemerintahan
Program Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang tepat sasaran	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Jaringan Komunikasi	Persentase kecamatan yang terkoneksi jaringan internet dan telekomunikasi dengan baik	Komunikasi dan Informatika
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah siskamling desa aktif	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Persentase sanksi pelanggaran regulasi yang diterapkan di kawasan perbatasan	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Penunjang Pemerintahan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah kelompok dan desa siaga bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Program Penjagaan Wilayah Perbatasan	Waktu tanggap respon bencana daerah (dalam satuan menit)	Penunjang Pemerintahan
	Persentase pelintas batas pembawa narkoba yang diberi sanksi hukum	
Program Koordinasi antar Lembaga dalam Provinsi	Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga dalam provinsi	Penunjang Pemerintahan
Program Koordinasi antar Lembaga Provinsi dengan Pusat	Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga provinsi dan pusat	Penunjang Pemerintahan



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
Program Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Wilayah Perbatasan yang Tertib dan Aman	Jumlah aparat siskamling aktif di wilayah perbatasan	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Jumlah SDM Penegak Hukum	Persentase aparat penegak hukum berbanding jumlah penduduk	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi	Persentase jumlah masyarakat yang berada di lintas batas tertib hukum dan regulasi	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum	Persentase masyarakat yang mematuhi hukum	Penunjang Pemerintahan
Program Penyusunan Penegakan Hukum	Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum	Penunjang Pemerintahan
Program Pengawasan Penegakan Hukum	Persentase penurunan pelanggaran penegakan hukum	Penunjang Pemerintahan
Program Penyusunan Regulasi Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan yang bersih dari KKN	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan untuk pelayanan perizinan	Penunjang Pemerintahan
Program Sistem Informasi Manajemen Database Penegakan Hukum	Persentase masyarakat sadar hukum	Penunjang Pemerintahan
Program Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai indeks reformasi birokrasi	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Organisasi perangkat daerah yang telah tervaluasi kelembagaannya	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jenis dokumen pelaporan daerah pemerintah provinsi yang disusun tepat waktu	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Nilai indeks kepuasan masyarakat/survei kepuasan masyarakat	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensinya	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara	Persentase terpenuhinya JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase SDM yang mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian dan diklat sesuai SOP	Penunjang Pemerintahan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase perda yang memenuhi kebutuhan dan regulasi (jumlah perda terbit dibagi jumlah regulasi terkait dengan kebutuhan)	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparat desa yang mendapat bimbingan teknis penguatan tupoksi kelembagaan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengendalian Pembangunan Desa	Persentase desa yang membuat laporan pengelolaan keuangan desa sesuai kaidah regulasi yang ada	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kabupaten/kota yang berinisiasi menuju Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan temuan obyek pemeriksaan tertib administrasi dan keuangan	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Penunjang Pemerintahan
Program Intensifikasi Penanganan	Persentase pengaduan masyarakat	Penunjang



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
Pengaduan Masyarakat	yang telah ditindaklanjuti	Pemerintahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase database pendukung prasyarat administrasi dan keuangan DOB	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase nilai pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan dan pangkat auditor	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil perencanaan pembangunan yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	hasil perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	hasil perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Sosial Budaya	hasil perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	hasil perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Persentase isu strategis yang tertangani	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Data/Informasi	Data perencanaan yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Pengendalian Pembangunan	Pencapaian sasaran yang sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	hasil perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar	hasil perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar yang terpublikasi	Penunjang Pemerintahan
Program Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan	Persentase infrastruktur simpul jaringan yang dibangun	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Data Spasial	Bentang wilayah yang terdatakan secara spasial	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah	Pertumbuhan investasi dan aset daerah	Penunjang Pemerintahan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Persentase desa dan kecamatan yang menggunakan <i>e-government</i>	Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Persandian, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Efisiensi layanan administrasi umum, persandian, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Efisiensi pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah	Penunjang Pemerintahan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan dan dilestarikan	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang terealisasi	Penunjang Pemerintahan
Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama pembangunan antardaerah, antarwilayah dan antarnegara	Penunjang Pemerintahan
	Jumlah kerjasama pembangunan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan swasta	



Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Bidang Urusan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase lembaga pemerintah daerah yang memiliki kapasitas sesuai standar	Penunjang Pemerintahan
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Sistem administrasi pertanahan yang <i>ter-update</i>	Pertanahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah yang terdaftar	Pertanahan
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Pertanahan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik	Persentase tersedianya SOP pelayanan publik di seluruh instansi Provinsi Kalimantan Utara	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Sistem Komplain	Persentase masyarakat yang menyatakan puas terhadap penyelesaian pengaduan	Penunjang Pemerintahan
Program Peningkatan Standar Layanan Prima	Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Prima	Penunjang Pemerintahan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Persentase layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	Komunikasi dan Informatika
Program Sosialisasi Penerapan SPM Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang menggunakan SPM dalam prosedur pelayanan publik	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Budaya Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Internalisasi dan Sosialisasi	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Penunjang Pemerintahan
Program Pembinaan, Fasilitasi, dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Jumlah partisipasi aktif anggota KORPRI	Penunjang Pemerintahan
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi perizinan	Penunjang Pemerintahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KTP	Kependudukan dan Catatan Sipil